

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KOPERASI & UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan, sekaligus untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan.

LKJIP Tahun 2024 ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, termasuk analisis capaian, kendala, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan berbagai peraturan lainnya yang relevan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data, maupun evaluasi kinerja. Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan untuk peningkatan kinerja organisasi ke depan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Sumatera Selatan.

Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Palembang, 17 Februari 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196605091992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Peta Proses Bisnis.....	2
1.3.1 Tugas Pokok	3
1.3.2 Fungsi.....	3
1.3.3 Peta Proses Bisnis.....	4
1.4 Sumber Daya	5
1.4.1 Sumber Daya Manusia	5
1.4.2 Sarana dan Prasarana	7
1.4.3 Dukungan Anggaran	8
1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	8
1.5.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi	9
1.5.2 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM	9
1.5.3 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan	10
1.5.4 Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah.....	10
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	11
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	19
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya.....	21
3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA	22
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional	24
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	25
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	34
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
3.2 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	5
Tabel 1.2	Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang.....	6
Tabel 1.3	Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan.....	6
Tabel 1.4	Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	7
Tabel 1.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2024.....	7
Tabel 1.6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	11
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	14
Tabel 2.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	15
Tabel 2.3	Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	17
Tabel 2.5	Dukungan Program dan Anggaran	17
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya.....	22
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA	23
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional	24
Tabel 3.5	Jumlah UMKM per Sektor dan Skala Usaha di Sumatera Selatan	25
Tabel 3.6	Laju Implisit PDRB menurut Triwulanan (Persen) Tahun 2024	26
Tabel 3.7	Jumlah UMKM per Wilayah per Skala Usaha di Sumatera Selatan.....	27
Tabel 3.8	Rasio Kewirausahaan Daerah.....	28
Tabel 3.9	Rekap Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun 2024	30
Tabel 3.10	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Sumatera Selatan.....	31
Tabel 3.11	Volume Usaha Koperasi di Sumatera Selatan	33
Tabel 3.12	Usulan Kredit Program PIP	34
Tabel 3.13	Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Tiap Program.....	35
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024.....	37
Tabel 3.15	Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBD.....	38
Tabel 3.16	Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBN.....	39
Tabel 3.17	Perubahan Anggaran APBD 2024	39
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran tiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	40
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran tiap Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024 Satker Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	44
Tabel 4.1	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pemberdayaan Koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM;
2. Mendorong Dinas Koperasi dan UKM didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UKM di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

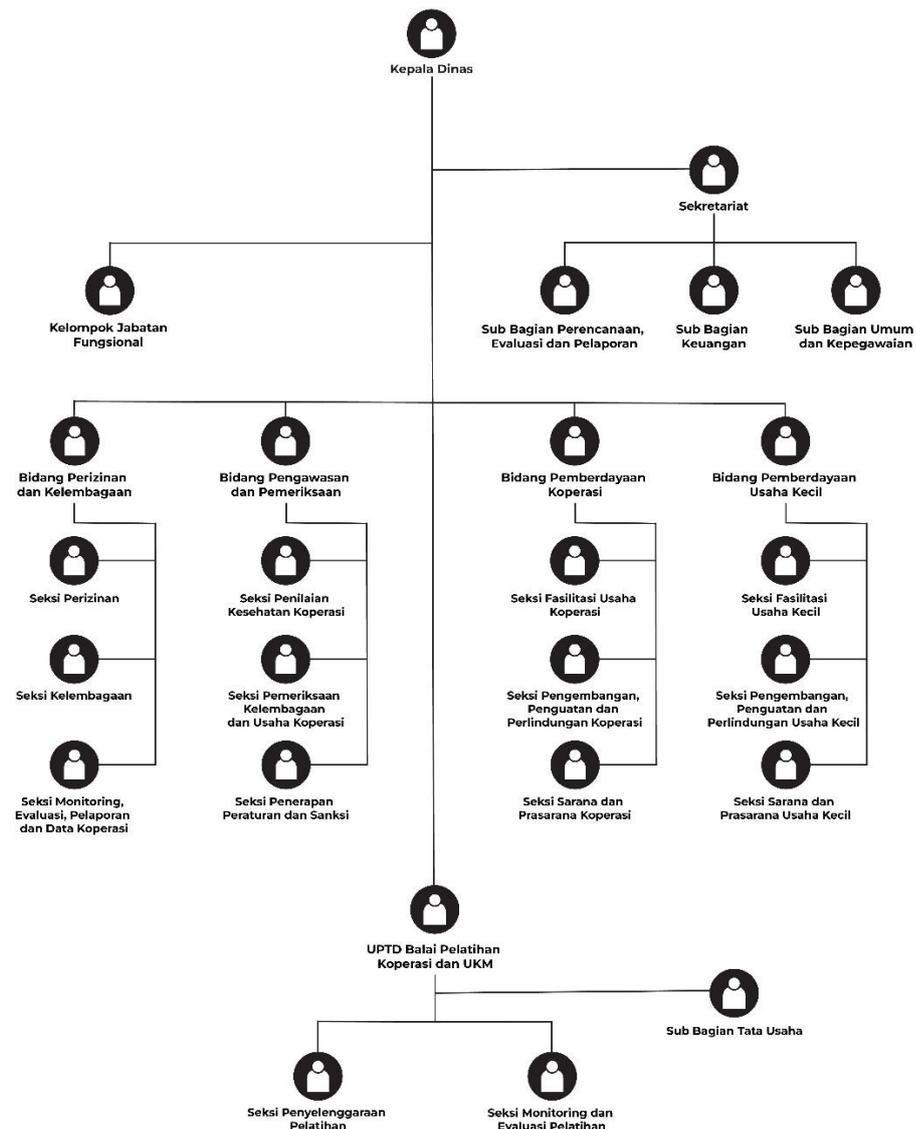
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Peta Proses Bisnis

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam ketentuan turunannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, di mana tipologi Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Selatan merupakan Tipe A yang mempunyai unit kerja terdiri dari satu sekretariat paling banyak 3 sub bagian, 4 Bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi, dan 1 UPTD dengan 3 sub bagian dapat dilihat pada struktur organisasi pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sementara, UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penelitian perkoperasian usaha kecil dan menengah.

1.3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;

2. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
4. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

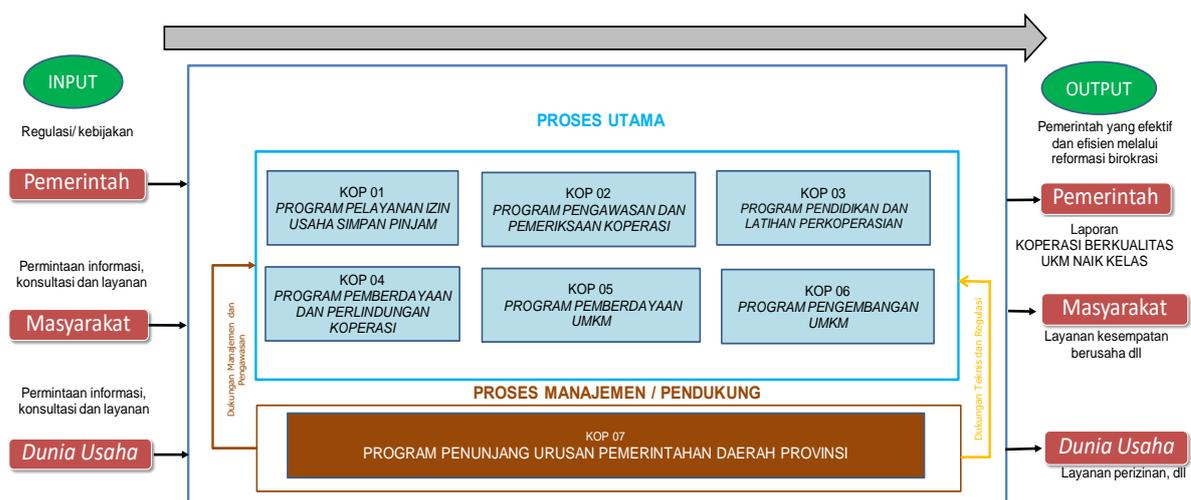
UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program kerja;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
3. Penyusunan penyelenggaraan kegiatan program kerja;
4. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait;
6. Pelaksanaan pelatihan, studi banding dan magang koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi program kerja;
8. Pelaksanaan pengendalian intern;
9. Pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepala subbagian, kepala seksi, pelaksana dan fungsional;
10. Pelaksanaan penilaian sasaran kinerja kepala subbagian, kepala seksi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 Peta Proses Bisnis

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program teknis pemberdayaan KUMKM dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Proses Bisnis pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



1.4 Sumber Daya

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif. Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan program saat ini hingga masa mendatang karena keberadaan sumber daya aparatur akan menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2024, jumlah total pegawai adalah 76 orang, yang terdiri dari 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau 59% dari total pegawai, serta 31 orang Non-ASN atau 41% dari total pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Di kalangan ASN, 82% memiliki pendidikan perguruan tinggi yang terdiri atas 20 orang bergelar S2 (44%), 17 orang bergelar S1 (38%), dan tidak ada yang berpendidikan D3. Sebanyak 18% ASN lainnya berasal dari jenjang pendidikan non-perguruan tinggi, dengan rincian 6 orang lulusan SMA/SMK (13%), 1 orang lulusan SMP (2%), dan 1 orang lulusan SD (2%). Di sisi lain, pada kelompok Non-ASN, 68% memiliki pendidikan perguruan tinggi dengan 2 orang bergelar S2 (6%), 16 orang bergelar S1 (52%), dan 3 orang lulusan D3 (10%). Sisanya, sebanyak 32% Non-ASN berasal dari jenjang pendidikan non-perguruan tinggi, yang terdiri atas 9 orang lulusan SMA/SMK (29%) dan 1 orang lulusan SMP (3%), tanpa ada yang berasal dari jenjang SD.

Dari segi distribusi gender, jumlah pegawai perempuan lebih dominan dengan 51 orang atau 67% dari total pegawai, sementara jumlah pegawai laki-laki sebanyak 25 orang atau 33%. Komposisi ini menunjukkan keberagaman dan potensi kesetaraan gender yang baik di lingkungan kerja. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dominasi pegawai dengan pendidikan tinggi, baik pada ASN maupun Non-ASN, serta adanya peran signifikan pegawai perempuan dalam mendukung operasional organisasi. Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	ASN					Non ASN					
		Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN	Persentase terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap Non ASN	Persentase terhadap Seluruh Pegawai	
L	P	Total	L	P			Total					
A	Perguruan Tinggi	18	19	37	82%	49%	7	14	21	68%	28%	
1	S2	7	13	20	44%	26%	0	2	2	6%	3%	
2	S1	11	6	17	38%	22%	6	10	16	52%	21%	
3	D3	0	0	0	0%	0%	1	2	3	10%	4%	
B	Bukan Perguruan Tinggi	7	1	8	18%	11%	5	5	10	32%	13%	
4	SMA / SMK	5	1	6	13%	8%	4	5	9	29%	12%	
5	SMP	1	0	1	2%	1%	1	0	1	3%	1%	
6	SD	1	0	1	2%	1%	0	0	0	0%	0%	
Jumlah		25	20	45	100%	59%	12	19	31	100%	41%	
Jumlah Seluruh Pegawai												76

Selanjutnya, berdasarkan golongan/ruang, mayoritas ASN berada di Golongan III dengan total 27 orang atau 60% dari seluruh ASN. Di dalamnya, terdapat 16 orang pada sub-

golongan III/d (36%), 6 orang pada sub-golongan III/c (13%), 5 orang pada sub-golongan III/b (11%), dan tidak ada ASN pada sub-golongan III/a. Selanjutnya, ASN di Golongan IV berjumlah 13 orang atau 29%. Rinciannya, 8 orang berada di sub-golongan IV/a (18%), 3 orang di IV/b (7%), serta masing-masing 1 orang di IV/c dan IV/d (2%). Pada Golongan II, terdapat 3 orang ASN atau 7% dari total ASN, terdiri atas 2 orang di sub-golongan II/d (4%) dan 1 orang di II/c (2%), tanpa ASN di sub-golongan II/b dan II/a. Sementara itu, Golongan I memiliki 2 orang ASN atau 4% dari total, yang semuanya berada di sub-golongan I/d.

Distribusi ini menunjukkan konsentrasi ASN berada di golongan menengah (III), yang mendominasi struktur kepegawaian instansi. Data ini dapat menjadi acuan dalam merencanakan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia sesuai golongan di masa mendatang, dimana secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai			Persentase terhadap ASN
		L	P	Total	
1	Golongan IV	5	8	13	29%
a	IV/d	1	0	1	2%
b	IV/c	1	0	1	2%
c	IV/b	1	2	3	7%
d	IV/a	2	6	8	18%
2	Golongan III	15	12	27	60%
a	III/d	8	8	16	36%
b	III/c	4	2	6	13%
c	III/b	3	2	5	11%
d	III/a	0	0	0	0%
3	Golongan II	3	0	3	7%
a	II/d	2	0	2	4%
b	II/c	1	0	1	2%
c	II/b	0	0	0	0%
d	II/a	0	0	0	0%
4	Golongan I	2	0	2	4%
a	I/d	2	0	2	4%
b	I/c	0	0	0	0%
c	I/b	0	0	0	0%
d	I/a	0	0	0	0%
JUMLAH		25	20	45	100%

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari total 45 pegawai yang ada, sebanyak 2% menempati posisi Eselon II.a, yang merupakan tingkat kepemimpinan tertinggi dalam struktur organisasi. Selanjutnya, terdapat 13% pegawai yang berada pada tingkat Eselon III, dengan rincian 11% di Eselon III.a dan 2% di Eselon III.b. Sementara itu, sebanyak 38% pegawai menduduki jabatan Eselon IV.a, yang bertanggung jawab dalam operasional harian instansi. Selain itu, terdapat 2% pegawai yang menempati Jabatan Fungsional Tertentu. Kelompok terbesar dalam struktur organisasi ini adalah pegawai pelaksana, yang mencapai 44% dari total pegawai. Komposisi ini mencerminkan proporsi tenaga kerja yang didominasi oleh pegawai pada level pelaksana dan struktural tingkat menengah, yang berperan penting dalam mendukung jalannya program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN
		L	P	Total	
1	Eselon II.a	1	0	1	2%
2	Eselon III	3	3	6	13%

	- Eselon III.a	2	3	5	11%
	- Eselon III.b	1	0	1	2%
3	Eselon IV.a	7	10	17	38%
4	Jabatan Fungsional Keahlian (Pustakawan)	0	1	1	2%
5	Pelaksana	14	6	20	44%
JUMLAH		25	20	45	100%

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, sebanyak 42% dari total ASN telah mendapatkan pelatihan kepemimpinan. Dari jumlah tersebut, 22% telah mengikuti Diklat Administrasi Umum (ADUM), Diklat PIM IV, atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), yang berfokus pada pengembangan kompetensi kepemimpinan di tingkat pengawas. Selanjutnya, sebanyak 16% pegawai telah menyelesaikan Diklat SPAMA, Diklat PIM III, atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), yang ditujukan bagi pejabat administrator untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Sementara itu, 4% pegawai telah mengikuti Diklat SPAMEN, Diklat PIM II, atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), yang diperuntukkan bagi pejabat struktural tingkat tinggi untuk memperkuat strategi kepemimpinan di lingkungan pemerintahan. Komposisi ini mencerminkan bahwa hampir setengah dari total ASN di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan pembekalan kepemimpinan, yang menjadi modal penting dalam peningkatan kinerja dan efektivitas organisasi., dimana secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN
		L	P	Total	
1	ADUM/ Diklat PIM IV/ PKP	3	7	10	22%
2	SPAMA/Diklat PIM III/ PKA	3	4	7	16%
3	SPAMEN/Diklat PIM II/ PKN	2	0	2	4%
Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat		8	11	19	42%
Jumlah Seluruh Pegawai		25	20	45	100%

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdiri di atas lahan seluas 2.375 m² berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 565 Palembang dengan asal usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mendukung operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan fasilitas seperti peralatan kantor, perlengkapan kerja, komputer, meubelair, perangkat komunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana, Perlengkapan dan Aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2024

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Baik
2	02.02.01.01.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Baik
3	02.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik
4	02.05.01.04.007	Brandkas	1	Baik
5	02.05.01.05.052	Pintu Elektrik (yang Memakai	1	Baik
6	02.05.02.01.048	Sofa	1	Baik
7	02.05.02.06.002	Televisi	1	Baik

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
8	02.05.02.06.008	Sound System	1	Baik
9	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	1	Baik
10	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	1	Baik
11	02.05.03.06.010	Kursi Tamu di Ruang Tunggu	1	Baik
12	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	1	Baik
13	02.06.01.02.126	Camera Digital	1	Baik
14	02.06.02.01.010	Facsimile	1	Baik
15	02.10.01.02.009	Tablet PC	1	Baik
16	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
17	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2	Baik
18	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2	Baik
19	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	Baik
20	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2	Baik
21	02.05.02.01.008	Meja Rapat	3	Baik
22	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	3	Baik
23	02.06.02.01.004	Telephone Mobile	3	Baik
24	02.05.02.04.001	Lemari Es	4	Baik
25	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
26	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	8	Baik
27	02.05.02.01.032	Kursi Putar	8	Baik
28	02.10.01.02.003	Note Book	8	Baik
29	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	10	Baik
30	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	10	Baik
31	02.05.02.06.038	Dispenser	10	Baik
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	Baik
33	02.10.01.02.002	Lap Top	13	Baik
34	02.10.01.02.001	P.C Unit	14	Baik
35	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	17	Baik
36	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Baik
37	02.05.02.04.004	A.C. Split	27	Baik
38	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	78	Baik
39	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	90	Baik
40	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	138	Baik
41	1.5.3.01.001.005.001	Website/ Marketplace	1	Baik
42	1.5.3.01.001.005.001	Website/market place	1	Baik

1.4.3 Dukungan Anggaran

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan didukung dana APBD sebesar **Rp15.206.848.747,-** (*lima belas milyar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang bersumber dari PAD sebesar Rp3.156.693.747,- (*tiga milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), DAU sebesar Rp7.820.263.000,- (*tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dan DAK-NF sebesar Rp4.229.892.000,- (*empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)

Dinas juga mendapat alokasi APBN Dana Dekonsentrasi melalui Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi sebesar **Rp3.069.698.000,-** (*tiga miliar enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan telah dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata Kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
 - b. Kaum muda (millenials) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
 - a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (credit union);
 - b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
 - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan.

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

1.5.2 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.
 - b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.

- c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Produksi dan Pemasaran
 - a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
 - b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
 - c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
 - d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.
3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Kelembagaan

Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

1.5.3 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

1.5.4 Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai,
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART) sehingga berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD,
3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,
3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Saran/Rekomendasi dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam LHE SAKIP No. 700/108.3/ITDAPROV.IV/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan uraian sebagaimana Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
1	Agar dokumen perencanaan yang dilampirkan harus sudah diformalkan atau bertanda tangan dari Kepala Dinas Koperasi & UKM.	Dokumen RENJA dan RENSTRA ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi & UKM.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Selesai	https://bit.ly/4hclpfM
2	Dalam membuat dokumen Rencana Aksi (renaksi) sebagai dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja,	Dokumen Rencana Aksi Kinerja memuat target anggaran per triwulan.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Selesai	https://bit.ly/3DPxjCG

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
	harus memuat target anggaran per triwulan.				
3	Agar dalam melakukan pengukuran kinerja penyesuaian (refocusing) melampirkan sumber data dukung berupa Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan atau data dukung lainnya.	Monitoring pencapaian kinerja diukur dengan melampirkan data dukung berupa DPA Induk dan DPA Perubahan.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Selesai	https://bit.ly/42c0bik
4	Agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja didukung dengan data yang memadai.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal didukung dengan data yang memadai dari seluruh bidang/UPTD.	Kepala Bidang/ UPTD	Selesai	https://bit.ly/3BWfnWr
5	Hasil evaluasi kinerja internal pada Dinas Koperasi & UKM agar dilaporkan secara tertulis dalam bentuk formal.	Hasil evaluasi kinerja internal pada Dinas Koperasi & UKM dilaporkan kepada pimpinan organisasi melalui nota dinas.	Sekretaris Dinas	Selesai	https://bit.ly/4j7CJJr
6	Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan secara berjenjang.	Kepala Bidang/ UPTD	Selesai	https://bit.ly/4aiPKeR
7	Memanfaatkan hasil penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.	Hasil penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimanfaatkan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.	Sekretaris Dinas	Selesai	https://bit.ly/4gQxY5b
8	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023 yang masih dalam proses yaitu:				-
	Menyusun kebijakan terkait dengan pemberian reward and punishment terkait dengan pencapaian kinerja.	Implementasi kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i> terkait dengan pencapaian kinerja yang sudah disusun.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Selesai	https://bit.ly/4gRXqYe
	Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala menggunakan teknologi informasi.	Evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala menggunakan teknologi informasi.	Sekretaris Dinas	Selesai	https://bit.ly/4ahVxl4

1.7 Sistematika Penulisan

Susunan dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian penjelasan umum organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi, mandat kinerja, strategi OPD beserta dukungan SDM sarana-prasarana dan anggaran.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar indikator kinerja, strategi kebijakan dan program-kegiatan OPD serta perjanjian kinerja dan instrumen pendukung capaian kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menggambarkan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur Sumatera Selatan, di bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Visi Sumatera Selatan "***Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan***", berada pada **Misi ke-1 (satu):** "*Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional.*" Visi dan misi ini mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 sebagai dokumen penerus dari RJPD Tahun 2005-2025. Adapun dokumen RPJMD belum ditetapkan menunggu terpilihnya kepala daerah difinitif sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Salinan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan tujuan, sasaran beserta target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target kinerja Sasaran Pada Tahun:		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	1. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor perdagangan besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Makan dan Minum	%	3,93	4,52	5,20
			1.1 Meningkatkan usaha kecil yang Menjadi Wirausaha	%	3,0	3,5	4,0
			1.2 Rasio kewirausahaan	%	3,14	3,14	3,14
		Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	2. Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas	%	5	5	5
			2.1 Persentase Koperasi Aktif	%	66,20	70,84	76,51
			2.2 Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi	%	16	18	20

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan	Sasaran	Starategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	1. Peningkatan skala usaha kecil menjadi wirausaha	1. Pemberdayaan UMKM yang efektif 2. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM
		2. Peningkatan rasio kewirausahaan	1. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif 2. Akselerasi Transformasi usaha informal ke formal
	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	1. Peningkatan koperasi aktif	1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi 2. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi
		2. Peningkatan pertumbuhan omzet koperasi	1. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan koperasi 2. Pembaharuan kelembagaan dan usaha koperasi

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Untuk memahami keterkaitan antara sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3. Selain itu, hubungan antara sasaran dan indikator kinerja juga divisualisasikan dalam bentuk **pohon kinerja**, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.1.

Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Indikator
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik (100%)
2	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (5%)
		<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya (20%)</i>
		Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (20 kop)
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (5%)
		<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan (10%)</i>

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Indikator
		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Koperasi yg Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian (20 kop)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Modal Koperasi (12,23%)
		<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (2%)</i>
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (438 orang)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif (66,20%)
		<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan omzet koperasi (16%) - koperasi yang melaksanakan RAT (10,10%) - Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi (0,98%) - Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL (0,35%)
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi yg Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (30 kop)
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (20 kop)
3	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (3%)
		<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit (24,69%) - usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar (65%)
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (656 orang)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Kewirausahaan (3,14%)
		<i>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan wirausaha (3,0%) - promosi dan pemasaran produk UKM (1 kali) - UMKM on-boarding digital (105.787 UMKM)
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran (17 Unit Usaha)
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (200 orang)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Pj.Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan target kinerja, yang dijabarkan dalam 7 Program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan UMKM, dan Program Pengembangan UMKM, dengan total 12 kegiatan 24 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Selatan (termasuk DAK Non Fisik) sebesar **Rp15.206.848.747,-** (*lima belas milyar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan APBN Dana Dekonsentrasi melalui Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi sebesar **Rp3.069.698.000,-** (*tiga miliar enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut ini:

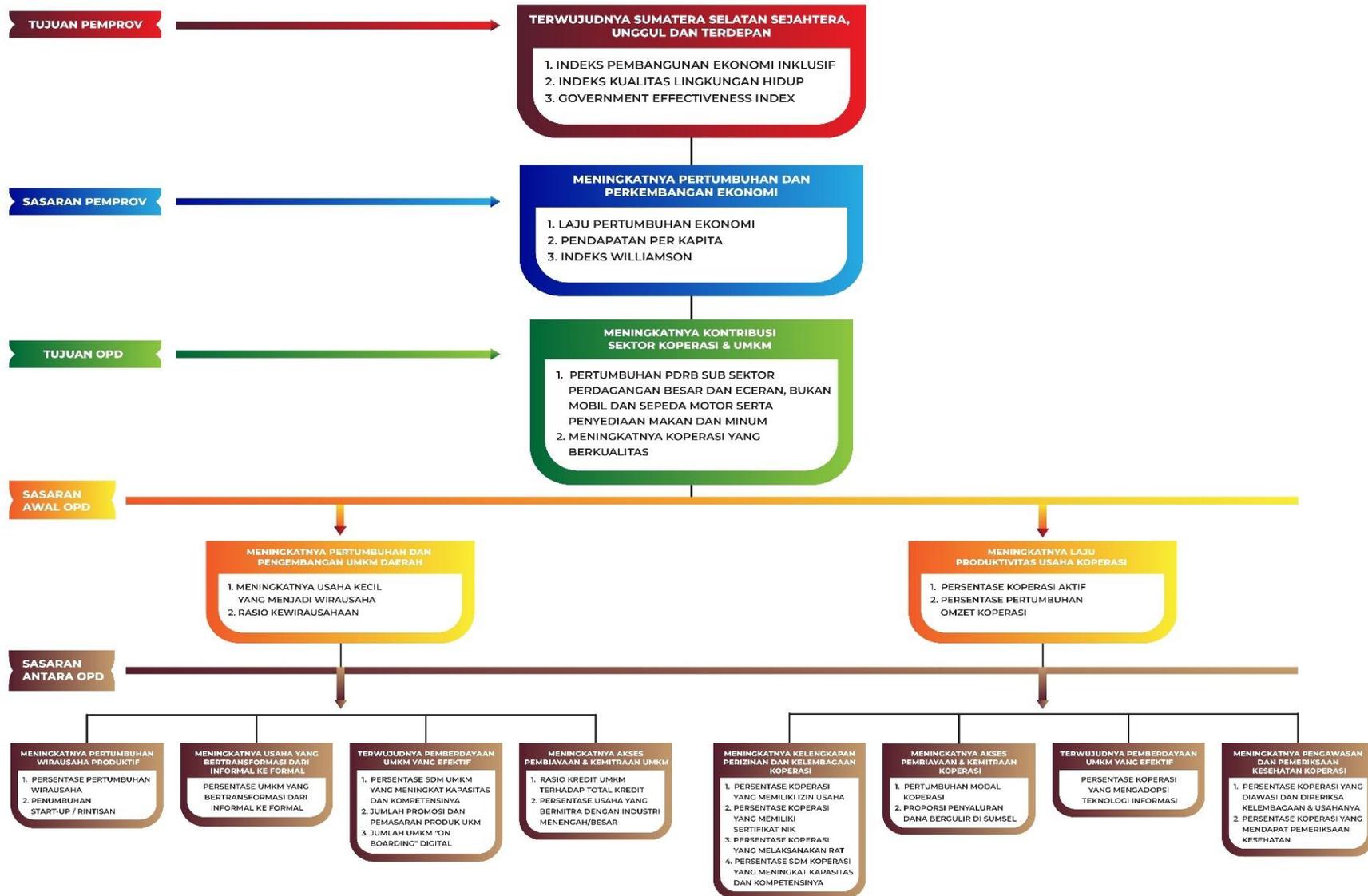
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	1. Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum	3,93%
		1.1. Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	3%
		1.2. Rasio kewirausahaan	3,14%
2.	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	2. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	5%
		2.1. Persentase koperasi aktif	66,2%
		2.2. Persentase pertumbuhan omzet koperasi	16%

Tabel 2.5 Dukungan Program dan Anggaran

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	10.336.956.747,-	APBD
2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	175.000.000,-	APBD
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.342.500.000,-	APBD
4	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50.000.000,-	APBD
5	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.000.000,-	APBD
6	Pemberdayaan UMKM	2.653.783.351,-	APBD
7	Pengembangan UMKM	628.608.649,-	APBD
8	Kewirausahaan UMKM dan Koperasi	3.069.698.000,-	APBN
	<i>Jumlah APBD</i>	<i>15.206.848.747,-</i>	
	<i>Jumlah APBN</i>	<i>3.069.698.000,-</i>	
	Total Anggaran	18.276.546.747,-	

Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi mengacu pada tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Hal ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang disepakati sebelumnya. Capaian kinerja mencerminkan sejauh mana organisasi mampu mengelola sumber dayanya secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*). Hasil perbandingan ini dianalisis untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Capaian kinerja dinas disajikan berdasarkan pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, yang dianalisis melalui pengukuran kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Metode analisis mencakup: (1) membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini; (2) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir; (3) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen rencana strategis organisasi; (4) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; (5) menganalisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja beserta solusi yang telah diambil; (6) menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan (7) menganalisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Dengan pendekatan ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat mengevaluasi kinerjanya secara komprehensif dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta produktivitas usaha koperasi di daerah. Berikut adalah analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai:

(1). Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM Daerah

- a. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Makan dan Minum
Target yang ditetapkan sebesar 3,93% berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 4,08%, atau 103% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di subsektor tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.
- b. Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Usaha Menengah

Target pertumbuhan usaha kecil menjadi usaha menengah sebesar 3,00% belum tercapai secara maksimal, dengan realisasi sebesar 2,96% atau 99% dari target. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan usaha kecil menuju usaha menengah telah berjalan dengan baik, hanya perlu sedikit peningkatan untuk mencapai target yang diharapkan.

c. Rasio Kewirausahaan

Target rasio kewirausahaan sebesar 3,14% juga belum tercapai, dengan realisasi sebesar 3,09% atau 98% dari target. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha tetap tinggi, hanya perlu sedikit dorongan lagi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

(2). Peningkatan Produktivitas Usaha Koperasi

a. Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas

Target peningkatan koperasi berkualitas sebesar 5,00% berhasil dilampaui dengan capaian sebesar 7,42% atau 148% dari target. Ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas koperasi berjalan sangat efektif dan memberikan hasil yang signifikan.

b. Persentase Koperasi Aktif

Target persentase koperasi aktif sebesar 66,20% belum tercapai, dengan realisasi sebesar 60,53% atau 91% dari target. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tetap aktif, namun perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi koperasi yang lebih besar.

c. Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi

Target pertumbuhan omzet koperasi sebesar 16,00% berhasil dilampaui secara signifikan dengan realisasi mencapai 57,24% atau 358% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa koperasi mengalami peningkatan omzet yang sangat besar, yang merupakan indikator positif bagi perkembangan usaha koperasi di daerah.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	1. Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum	%	3,93	4,06	103%
		1.1. Meningkatkan usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,00	2,96	99%
		1.2. Rasio kewirausahaan	%	3,14	3,09	98%
2.	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	2. Meningkatkan koperasi yang berkualitas	%	5,00	7,42	148%
		2.1. Persentase koperasi aktif	%	66,20	60,53	91%
		2.2. Persentase pertumbuhan omzet koperasi	%	16,00	57,24	358%

Secara umum, sebagaimana Tabel 3.1 capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal pertumbuhan PDRB subsektor perdagangan dan penyediaan makan serta minum, peningkatan kualitas koperasi, dan pertumbuhan omzet koperasi. Meskipun beberapa indikator seperti pertumbuhan usaha kecil menjadi usaha menengah dan rasio kewirausahaan belum mencapai target, capaian yang ada menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan hanya memerlukan sedikit peningkatan untuk mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian, instansi dapat melanjutkan program-

program yang telah berhasil dan melakukan evaluasi serta perbaikan pada program yang belum mencapai target untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Dalam rangka mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2023. Berikut adalah analisis perbandingan tersebut:

(1). Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM Daerah

- a. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Makan dan Minum

Pada tahun 2024, realisasi pertumbuhan PDRB subsektor ini mencapai 4,06%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,24%, dan lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 6,52%. Meskipun terjadi penurunan, capaian tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun perlu upaya lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan.

- b. Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Usaha Menengah

Realisasi tahun 2024 sebesar 2,96% menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 6,21%, namun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,8%. Meskipun terjadi penurunan dari tahun 2023, capaian tahun 2024 masih menunjukkan bahwa upaya pengembangan usaha kecil menuju usaha menengah tetap berjalan, meskipun perlu peningkatan untuk mencapai target yang lebih tinggi.

- c. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan pada tahun 2024 mencapai 3,09%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,03%, dan lebih tinggi dari tahun 2022 yang mencapai 2,34%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih perlu dorongan lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih tinggi.

(2). Peningkatan Produktivitas Usaha Koperasi

- a. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Realisasi tahun 2024 mencapai 7,42%, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 0,30%, dan jauh lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 1,1%. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas koperasi pada tahun 2024 berjalan sangat efektif dan memberikan hasil yang luar biasa.

- b. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif pada tahun 2024 mencapai 60,53%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 60,59%, namun lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 59,57%. Meskipun terjadi penurunan yang sangat kecil, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tetap aktif, meskipun perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi koperasi yang lebih besar.

- c. Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi

Pertumbuhan omzet koperasi pada tahun 2024 mencapai 57,24%, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar -

3,46%, dan jauh lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya mencapai 0,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa koperasi mengalami peningkatan omzet yang sangat besar pada tahun 2024, yang merupakan indikator positif bagi perkembangan usaha koperasi di daerah.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ke:		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	1. Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum	%	6,52	4,24	4,06
		1.1. Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	2,8	6,21	2,96
		1.2. Rasio kewirausahaan	%	2,34	3,03	3,09
2.	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	2. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	1,1	0,30	7,42
		2.1. Persentase koperasi aktif	%	59,57	60,59	60,53
		2.2. Persentase pertumbuhan omzet koperasi	%	0,72	(3,46)	57,24

Secara umum, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2 realisasi kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal peningkatan kualitas koperasi dan pertumbuhan omzet koperasi yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun beberapa indikator seperti pertumbuhan PDRB subsektor perdagangan dan persentase koperasi aktif mengalami sedikit penurunan, capaian yang ada menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, instansi dapat melanjutkan program-program yang telah berhasil dan melakukan evaluasi serta perbaikan pada program yang belum mencapai target untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA

Dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Berikut adalah analisis perbandingan tersebut:

(1). Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM Daerah

- a. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Makan dan Minum

Target akhir RENSTRA untuk pertumbuhan PDRB subsektor ini adalah sebesar 5,20%. Realisasi tahun 2024 mencapai 4,08%, atau 78% dari target akhir. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di subsektor tersebut telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang diharapkan.

- b. Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Usaha Menengah

Target akhir RENSTRA untuk peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah adalah sebesar 4,0%. Realisasi tahun 2024 mencapai 2,96%, atau 74% dari target akhir. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan usaha kecil menuju usaha menengah telah berjalan, meskipun masih perlu peningkatan yang signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Rasio Kewirausahaan

Target akhir RENSTRA untuk rasio kewirausahaan adalah sebesar 3,14%. Realisasi tahun 2024 mencapai 3,09%, atau 98% dari target akhir. Capaian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha telah mendekati target yang diharapkan, hanya memerlukan sedikit dorongan lagi untuk mencapai target akhir.

(2). Peningkatan Produktivitas Usaha Koperasi

a. Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas

Target akhir RENSTRA untuk peningkatan koperasi berkualitas adalah sebesar 5%. Realisasi tahun 2024 mencapai 7%, atau 140% dari target akhir. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas koperasi telah berjalan sangat efektif dan bahkan melampaui target yang ditetapkan.

b. Persentase Koperasi Aktif

Target akhir RENSTRA untuk persentase koperasi aktif adalah sebesar 76,51%. Realisasi tahun 2024 mencapai 60,53%, atau 79% dari target akhir. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tetap aktif, namun perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi koperasi yang lebih besar.

c. Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi

Target akhir RENSTRA untuk pertumbuhan omzet koperasi adalah sebesar 20%. Realisasi tahun 2024 mencapai 57%, atau 286% dari target akhir. Capaian ini menunjukkan bahwa koperasi mengalami peningkatan omzet yang sangat besar, jauh melampaui target yang ditetapkan, dan merupakan indikator positif bagi perkembangan usaha koperasi di daerah.

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2024-2026	Capaian
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	1. Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; <i>serta</i> penyediaan makan dan minum	%	5,20	4,06	78%
		1.1. Meningkatkan usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,0	2,96	74%
		1.2. Rasio kewirausahaan	%	3,14	3,09	98%
2.	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	2. Meningkatkan koperasi yang berkualitas	%	5	7	140%
		2.1. Persentase koperasi aktif	%	76,51	60,53	79%
		2.2. Persentase pertumbuhan omzet koperasi	%	20	57	286%

Secara umum, dilihat dari Tabel 3.3 realisasi kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal peningkatan kualitas koperasi dan pertumbuhan omzet koperasi yang melampaui target akhir RENSTRA. Meskipun beberapa indikator seperti pertumbuhan PDRB subsektor perdagangan dan persentase koperasi aktif belum mencapai target, capaian yang ada menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, instansi dapat melanjutkan program-program yang telah berhasil dan melakukan evaluasi serta perbaikan pada program yang belum mencapai target untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional

Dalam upaya mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian nasional. Berikut adalah analisis perbandingan tersebut:

(1). Rasio Kewirausahaan

Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan mencapai 3,09%, sementara standar nasional berada pada 3,35%. Meskipun capaian ini masih di bawah standar nasional, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha di Sumatera Selatan cukup tinggi. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong peningkatan rasio kewirausahaan agar dapat menyamai atau melampaui standar nasional.

(2). Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

Persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK di Sumatera Selatan mencapai 8,53%, jauh di bawah standar nasional yang mencapai 35,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak koperasi di Sumatera Selatan yang belum memiliki sertifikat NIK, yang merupakan aspek penting dalam legalitas dan pengakuan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan jumlah koperasi yang memiliki sertifikat NIK agar dapat mendekati atau mencapai standar nasional.

(3). Koperasi yang Menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Persentase koperasi yang menyelenggarakan RAT di Sumatera Selatan mencapai 17,39%, sementara standar nasional berada pada 36,28%. Capaian ini menunjukkan bahwa masih banyak koperasi di Sumatera Selatan yang belum menyelenggarakan RAT secara rutin. Padahal, RAT merupakan forum penting untuk transparansi dan akuntabilitas koperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi koperasi dalam menyelenggarakan RAT.

(4). Pertumbuhan Omzet Koperasi

Pertumbuhan omzet koperasi di Sumatera Selatan mencapai 57,24%, jauh melampaui standar nasional yang hanya mencapai 0,03%. Capaian ini menunjukkan bahwa koperasi di Sumatera Selatan mengalami peningkatan omzet yang sangat signifikan, yang merupakan indikator positif bagi perkembangan usaha koperasi di daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa program-program peningkatan produktivitas koperasi di Sumatera Selatan telah berjalan sangat efektif.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi SUMSEL	Realisasi NASIONAL
1.	Rasio Kewirausahaan*	%	3,09	3,35
2.	Koperasi memiliki sertifikat NIK **	%	8,53	35,19
3.	Koperasi yang menyelenggarakan RAT**	%	17,39	36,28
4.	Pertumbuhan Omzet koperasi**	%	57,24	0,03

* Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2024 (BPS)

** Data ODS

Secara umum, dilihat dari Tabel 3.4 realisasi kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam jika dibandingkan dengan capaian nasional. Meskipun beberapa indikator seperti rasio kewirausahaan, persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK, dan persentase koperasi yang menyelenggarakan RAT masih di bawah capaian nasional, pertumbuhan omzet koperasi di Sumatera Selatan justru melampaui capaian nasional secara signifikan. Dengan

demikian, instansi dapat melanjutkan program-program yang telah berhasil, seperti peningkatan omzet koperasi, sambil melakukan evaluasi dan perbaikan pada program yang belum mencapai standar nasional untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berikut merupakan analisis capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026:

(1). Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah

a. Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum

Laju (pertumbuhan) PDRB mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah yang diukur berdasarkan harga konstan, untuk sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menilai perubahan dalam volume produksi barang dan jasa tanpa pengaruh perubahan harga, sehingga memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi yang sebenarnya di (sub) sektor tersebut. Mengetahui laju pertumbuhan riil per sektor membantu dalam memahami dinamika ekonomi secara mendalam.

Sub-sektor perdagangan besar dan eceran, kecuali penjualan mobil dan sepeda motor serta usaha penyediaan makanan dan minuman, sebagai bagian dari pembentuk PDRB Sumatera Selatan, utamanya banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Berdasarkan Tabel 3.5, dari total 546.724 UMKM, sektor perdagangan dan reparasi mobil/sepeda motor mendominasi (331.430 UMKM atau 60,6%), diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum (82.295 UMKM atau 15%). Kedua sektor ini menegaskan peran vital UMKM dalam perekonomian daerah.

Tabel 3.5 Jumlah UMKM per Sektor dan Skala Usaha di Sumatera Selatan

No.	Sektor Usaha	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.177	4	-	1.181
2	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1.267	7	-	1.274
3	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.188	128	39	1.355
4	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	1.455	3	-	1.458
5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.482	6	1	1.489
6	Pertambangan dan Penggalian	1.597	8	2	1.607
7	Real Estat	2.197	10	1	2.208
8	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.501	12	6	2.519
9	Konstruksi	2.698	27	6	2.731
10	Pendidikan	3.460	45	5	3.510
11	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	4.300	17	1	4.318
12	Informasi dan Komunikasi	10.996	17	6	11.019
13	Pengangkutan dan Pergudangan	11.874	21	5	11.900
14	Aktivitas Jasa Lainnya	19.946	10	5	19.961
15	Industri Pengolahan	66.392	59	18	66.469
16	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	82.224	62	9	82.295
17	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	329.757	1.496	177	331.430
JUMLAH		544.511	1.932	281	546.724

Sumber: SIDT KUMKM (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Pengukuran Laju (pertumbuhan) PDRB sub-kategori ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja UMKM di wilayah Sumatera Selatan dalam suatu periode. Data diambil dari Laporan Laju Implisit PDRB (BPS) dengan cara menambahkan sub kategori "Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor", sub kategori "Penyediaan Makan Minum" serta "industri pengolahan".

Tabel 3.6 Laju Implisit PDRB menurut Triwulanan (Persen) Tahun 2024

Lapangan Usaha	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Jumlah
Industri Pengolahan	0,94	0,14	0,37	1,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,51	0,47	0,21	1,19
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0,2	0,98	0,24	1,42
TOTAL	1,65	1,59	0,82	4,06

Target pertumbuhan PDRB subsektor ini pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 3,93%, dengan realisasi mencapai 4,06% atau 103% dari target. Dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,24% dan tahun 2022 sebesar 6,52%, terjadi tren penurunan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian tahun 2024 juga masih di bawah target jangka menengah RENSTRA sebesar 5,20%.

Faktor Pendorong indikator ini yaitu adanya: (1) keterlibatan aktif dari banyak pihak terhadap pengembangan UMKM di daerah; (2) peningkatan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat pascapandemi, serta (3) dukungan kebijakan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produk UMKM. Namun, perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh:

- * Daya Beli Melemah dan Persaingan Ketat – Kondisi ekonomi yang berfluktuasi dan meningkatnya kompetisi pasar.
- * Terbatasnya Akses Pendanaan – Sulit mendapatkan modal usaha dengan skema yang sesuai.
- * Kesulitan Ekspansi Pasar – Minimnya akses ke pasar lebih luas dan strategi pemasaran digital.
- * Rendahnya Adopsi Teknologi – Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi dan digitalisasi bisnis.
- * Kurangnya Jaringan dan Kemitraan – Sulit membangun koneksi bisnis yang mendukung pertumbuhan.
- * Kelemahan dalam Manajemen Bisnis – Tantangan dalam operasional, keuangan, dan pengelolaan SDM.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator:

- * Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha; dan
- * Kolaborasi dengan OJK, BI, komunitas pelaku usaha, BUMD, Bank Himbara dan lembaga eksternal lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro.

b. Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan

(Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahanya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Berdasarkan data pada Tabel 3.7, Sumatera Selatan memiliki total 546.724 UMKM, yang didominasi oleh usaha mikro sebanyak 544.511 (99,6%), sementara usaha kecil dan menengah masing-masing berjumlah 1.932 (0,35%) dan 281 (0,05%). Dominasi usaha mikro yang sangat tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih beroperasi pada skala kecil dengan potensi pertumbuhan yang belum optimal. Oleh karena itu, mendorong usaha kecil untuk berkembang menjadi wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dengan skema upah yang sesuai menjadi langkah strategis. Upaya ini tidak hanya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Tabel 3.7 Jumlah UMKM per Wilayah per Skala Usaha di Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	11.779	105	8	11.892
2	Kota Pagar Alam	12.563	134	16	12.713
3	Kab. Musi Rawas Utara	14.016	71	8	14.095
4	Kab. Musi Rawas	17.873	3	-	17.876
5	Kota Prabumulih	18.958	151	24	19.133
6	Kab. Ogan Komering Ilir	21.056	3	2	21.061
7	Kab. OKU Selatan	21.789	201	28	22.018
8	Kab. Musi Banyuasin	23.639	15	2	23.656
9	Kab. Empat Lawang	23.958	110	9	24.077
10	Kota Lubuk Linggau	29.536	315	49	29.900
11	Kab. Lahat	31.315	315	46	31.676
12	Kab. Ogan Komering Ulu	37.358	8	2	37.368
13	Kab. Banyuasin	39.935	12	6	39.953
14	Kab. Ogan Ilir	41.976	-	3	41.979
15	Kab. OKU Timur	56.995	419	66	57.480
16	Kab. Muara Enim	60.350	17	-	60.367
17	Kota Palembang	81.415	53	12	81.480
JUMLAH		544.511	1.932	281	546.724

Sumber: SIDT KUMKM (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Target peningkatan jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha pada tahun 2024 sebesar 3,00%, namun realisasi hanya mencapai 2,96% atau 99% dari target. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 6,21%, tetapi lebih baik dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,8%. Kegagalan mencapai target disebabkan oleh:

- * Terbatasnya akses pembiayaan bagi usaha kecil serta rendahnya kesiapan dalam bertransformasi ke skala usaha yang lebih besar;
- * UMKM memerlukan permintaan pesanan baru dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi kemudian merekrut tenaga kerja;
- * UMKM tidak dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan kapitalisasi aset agar bisa naik kelas.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- * Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha; dan
- * Pendampingan UMKM untuk *on boarding* ke LKPP.

c. Rasio kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Realisasi rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Rasio Kewirausahaan Daerah

Uraian	Agt 2022	Feb 2023	Agt 2023	Feb 2024
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	105.224	160.998	138.924	140.861
Angkatan Kerja	4.497.960	4.493.937	4.588.170	4.556.460
Rasio Kewirausahaan Sumatera Selatan	2,34%	3,58%	3,03%	3,09%

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (BPS)

Target rasio kewirausahaan tahun 2024 sebesar 3,14%, dengan realisasi mencapai 3,09% atau 98% dari target. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 (3,03%) dan tahun 2022 (2,34%). Namun, jika dibandingkan dengan standar nasional (3,35%), capaian ini masih lebih rendah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah:

- * Kondisi Kredit yang Ketat: Bank dan lembaga keuangan sering menetapkan persyaratan yang ketat untuk pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan *start-up*.
- * Stigma Sosial: Di beberapa budaya, kegagalan bisnis dapat membawa stigma negatif, menghalangi orang untuk mengambil risiko menjadi wirausahawan.
- * Pasar yang Jenuh: Persaingan di pasar yang sudah jenuh dapat membuat sulit bagi usaha baru untuk bertahan dan berkembang.
- * Keterampilan Manajemen yang Kurang: Pengusaha baru sering kali kekurangan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses.
- * Terbatasnya akses pelatihan dan pendampingan usaha bagi calon wirausaha baru, serta keterbatasan jaringan pemasaran bagi pelaku usaha pemula.

Dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- * Sosialisasi atau kampanye kewirausahaan kepada kalangan pemuda dan mahasiswa;

- * Peningkatan akses permodalan berbasis kredit usaha rakyat (KUR); dan
- * Pembentukan lembaga inkubator bisnis Sumsel: Inkubator Sriwijaya Bisnis Ce'nter.

(2). Sasaran 2: Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi

a. Meningkatkan koperasi yang berkualitas

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas merujuk pada peningkatan berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dalam manajemen, pelayanan, partisipasi anggota, keberlanjutan ekonomi, dan kontribusi sosial ekonomi yang positif, yang semuanya menggambarkan kualitas dan kinerja yang lebih baik dari koperasi tersebut. Koperasi yang berkualitas merupakan koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. Meningkatnya koperasi yang berkualitas berperan penting dalam beberapa aspek, termasuk pertumbuhan pendapatan dan laba koperasi dari tahun ke tahun, kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, tingkat keberlanjutan ekonomi koperasi dalam jangka panjang, serta tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Indikator Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas merupakan penghitungan koperasi dari jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) aktif.

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan *output* sehat dan cukup sehat sebagaimana Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK terdiri dari aspek tata kelola (paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi terutama bagi KUK 3 dan KUK 4), profil risiko (penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko), kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan), dan permodalan (kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan).

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$

- cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
- dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Berdasarkan Tabel 3.9, dari 4.382 koperasi aktif di Sumatera Selatan, hanya 184 koperasi atau 4,2% yang dinyatakan sehat, sementara 126 koperasi (2,9%) tergolong cukup sehat. Sebanyak 5 koperasi berada dalam pengawasan, dan 1 koperasi masuk dalam kategori pengawasan khusus. Sisanya, yaitu 4.066 koperasi atau 92,8%, belum mendapatkan penilaian kesehatan. Kota Palembang mencatat jumlah koperasi sehat terbanyak dengan 82 koperasi, diikuti oleh Musi Banyuasin dengan 52 koperasi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi belum diperiksa kesehatannya, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan sehat secara finansial.

Tabel 3.9 Rekap Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Koperasi Aktif	Skor Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi			
			Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus
1	Kab. Ogan Komering Ulu	242	-	-	-	-
2	Kab. Ogan Komering Ilir	492	15	2	3	-
3	Kab. Muara Enim	338	-	3	1	-
4	Kab. Lahat	149	1	-	-	-
5	Kab. Musi Rawas	585	-	-	-	-
6	Kab. Musi Banyuasin	408	52	-	-	-
7	Kab. Banyuasin	197	-	4	-	-
8	Kab. Ogan Ilir	145	5	-	-	-
9	Kab. OKU Timur	242	13	16	-	-
10	Kab. OKU Selatan	47	4	4	-	-
11	Kab. Empat Lawang	127	4	41	-	-
12	Kab. PALI	137	-	4	-	-
13	Kab. Musi Rawas Utara	137	4	-	-	-
14	Kota Palembang	830	82	52	1	1
15	Kota Prabumulih	125	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	47	-	-	-	-
17	Kota Lubuk Linggau	134	4	-	-	-
Jumlah		4.382	184	126	5	1

Sumber: Data diolah dari LHPKK Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Target peningkatan koperasi berkualitas sebesar 5,00% pada tahun 2024 telah terlampaui dengan capaian 7,42% atau 148% dari target. Realisasi ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 (0,30%) dan tahun 2022 (1,1%). Keberhasilan ini didukung oleh program pengawasan koperasi yang lebih ketat serta fasilitasi perizinan dan kelembagaan koperasi. Faktor lain yang berkontribusi adalah dorongan pemerintah dalam memperkuat tata kelola koperasi berbasis digital. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi yaitu:

- * Rendahnya kesadaran koperasi terhadap pentingnya aspek legalitas dan tata kelola keuangan yang baik;
- * Lembaga yang berkompeten menentukan koperasi yang berkualitas harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi;
- * Banyak koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan izinnya;
- * Banyak koperasi yang keberadaannya tidak sesuai data ODS;
- * Belum adanya sanksi yang dapat dipakai dalam pembinaan koperasi;

- * Izin pendirian tidak memerlukan verifikasi; dan
- * Penyalahgunaan izin koperasi sebagai suatu badan usaha.

Adapun kegiatan di Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini adalah:

- * Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota dilakukan pengawasan Koperasi secara periodik melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;
- * Penilaian kesehatan koperasi baik secara mandiri maupun oleh dinas;
- * Pendidikan dan Pelatihan pengurus Koperasi untuk peningkatan keterampilan teknis dan kapabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi; dan
- * PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang melakukan pendampingan kepada koperasi aktif agar dapat melaksanakan RAT setiap tahunnya.

b. Persentase koperasi aktif

Indikator persentase koperasi aktif merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat vitalitas dan keberlangsungan usaha dari seluruh koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Persentase ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya dengan total keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi. Semakin tinggi persentase koperasi aktif, maka semakin banyak koperasi yang berkontribusi secara nyata dalam perekonomian dan menunjukkan kondisi sektor koperasi yang sehat dan dinamis.

Tabel 3.10 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Sumatera Selatan

No.	Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Persentase Koperasi Aktif
1	Kab. Ogan Komering Ulu	412	242	170	59%
2	Kab. Ogan Komering Ilir	583	492	91	84%
3	Kab. Muara Enim	530	338	192	64%
4	Kab. Lahat	453	149	304	33%
5	Kab. Musi Rawas	730	585	145	80%
6	Kab. Musi Banyuasin	420	408	12	97%
7	Kab. Banyuasin	543	197	346	36%
8	Kab. Ogan Ilir	198	145	53	73%
9	Kab. OKU Timur	521	242	279	46%
10	Kab. OKU Selatan	256	47	209	18%
11	Kab. Empat Lawang	215	127	88	59%
12	Kab. PALI	155	137	18	88%
13	Kab. Musi Rawas Utara	383	137	246	36%
14	Kota Palembang	1.310	830	480	63%
15	Kota Prabumulih	155	125	30	81%
16	Kota Pagar Alam	144	47	97	33%
17	Kota Lubuk Linggau	231	134	97	58%
Jumlah		7.239	4.382	2.857	61%

Sumber: ODS per 31 Des 2024

Berdasarkan data tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.10, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 7.239 koperasi, dengan 4.382 (61%) di antaranya aktif dan 2.857 (39%) tidak aktif. Beberapa daerah mencatat kinerja baik, seperti Musi Banyuasin (97% aktif) dan Ogan Komering Ilir (84% aktif). Namun, daerah seperti OKU

Selatan (18% aktif), Pagar Alam (33% aktif), dan Lahat (33% aktif) menghadapi tantangan serius dalam menjaga aktivitas koperasi. Palembang, sebagai ibu kota, memiliki koperasi terbanyak (1.310), dengan 63% aktif. Secara umum, meskipun mayoritas koperasi masih beroperasi, diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan kinerja koperasi di daerah yang tertinggal dan mengurangi jumlah koperasi tidak aktif.

Target persentase koperasi aktif tahun 2024 sebesar 66,20% dengan realisasi mencapai 60,53% atau 91% dari target. Dibandingkan tahun 2023 (60,59%) dan tahun 2022 (59,57%), capaian ini menunjukkan sedikit penurunan. Selain itu, realisasi ini masih jauh dari target jangka menengah dalam RENSTRA sebesar 76,51%. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dalam pencapaian indikator ini, yaitu:

- * Rendahnya kapasitas manajerial pengelola koperasi,
- * Lemahnya kepatuhan terhadap regulasi,
- * Rendahnya jumlah koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan;
- * Aktivitas usaha koperasi tidak berjalan;
- * Pengelolaan koperasi tidak berdampak bagi kesejahteraan anggota; serta
- * minimnya inovasi produk koperasi.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- * Konsolidasi tenaga pendamping koperasi (PPKL) untuk mendampingi koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan pengembangan usaha koperasi;
- * Penerbitan Sertifikat NIK koperasi;
- * Fasilitasi Izin usaha simpan pinjam koperasi;
- * Penumbuhan Koperasi syariah; dan
- * Pelatihan teknis penguatan tata kelola kelembagaan usaha koperasi.

c. Persentase pertumbuhan omzet koperasi

Persentase pertumbuhan omzet koperasi merupakan indikator penting keberhasilan sebuah koperasi. Angka ini mencerminkan kemampuan koperasi dalam meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan pengelolaan yang baik, strategi bisnis yang efektif, dan kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan dinamika pasar. Namun, pertumbuhan yang negatif atau stagnan bisa menjadi sinyal adanya masalah internal atau eksternal yang perlu segera diatasi.

Pertumbuhan volume usaha koperasi di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang bervariasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11. Secara keseluruhan, volume usaha koperasi mengalami peningkatan signifikan sebesar 57%, dari Rp2,08 triliun menjadi Rp3,28 triliun. Beberapa daerah mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, seperti Kabupaten Banyuasin dengan kenaikan 368% dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan 169%. Namun, beberapa daerah mengalami penurunan, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu (-33%), Kota Prabumulih (-50%), dan Kabupaten PALI (-38%). Meskipun jumlah koperasi aktif bertambah dari 4.310 menjadi 4.382 unit,

tantangan dalam pengelolaan usaha tetap terlihat di beberapa wilayah yang mengalami penurunan volume usaha.

Tabel 3.11 Volume Usaha Koperasi di Sumatera Selatan

No	Kota / Kabupaten	Koperasi Aktif 2023	Koperasi Aktif 2024	Volume Usaha 2023 (Rp Juta)	Volume Usaha 2024 (Rp Juta)	Persentase Pertumbuhan Vol. Usaha
1	Kab. Ogan Komering Ulu	304	242	13.104	8.808	-33%
2	Kab. Ogan Komering Ilir	479	492	470.793	1.267.115	169%
3	Kab. Muara Enim	321	338	117.693	130.662	11%
4	Kab. Lahat	162	149	39.684	32.206	-19%
5	Kab. Musi Rawas	577	585	104.882	99.896	-5%
6	Kab. Musi Banyuasin	395	408	54.737	49.504	-10%
7	Kab. Banyuasin	182	197	115.974	543.097	368%
8	Kab. Ogan Ilir	141	145	27.372	26.147	-4%
9	Kab. OKU Timur	226	242	397.109	412.075	4%
10	Kab. OKU Selatan	43	47	8.370	7.785	-7%
11	Kab. Empat Lawang	125	127	1.131	2.063	82%
12	Kab. PALI	122	137	17.231	10.721	-38%
13	Kab. Musi Rawas Utara	126	137	8.249	7.108	-14%
14	Kota Palembang	808	830	656.199	642.479	-2%
15	Kota Prabumulih	124	125	12.404	6.170	-50%
16	Kota Pagar Alam	44	47	21.165	18.098	-14%
17	Kota Lubuk Linggau	131	134	17.907	12.900	-28%
Jumlah		4.310	4.382	2.084.001	3.276.833	57%

Sumber: ODS per 31 Des 2024

Target pertumbuhan omzet koperasi sumatera selatan tahun 2024 sebesar 16%, namun realisasi mencapai 57,24% atau 358% dari target, jauh melampaui capaian tahun 2023 (-3,46%) dan tahun 2022 (0,72%). Pencapaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan peningkatan produktivitas koperasi melalui penguatan akses pasar dan kemitraan dengan sektor swasta. Faktor Pendorong yang menyokong tercapainya indikator ini yaitu:

- * Proses *entry* data koperasi melalui aplikasi ODS yang terus diperbaiki dan ditingkatkan,
- * Peningkatan kapasitas produksi, transformasi digital dalam pemasaran, serta meningkatnya jumlah koperasi yang mengadopsi model bisnis berbasis teknologi, dan
- * Peningkatan akses pasar dan pembiayaan bagi koperasi.

Namun, masih terdapat kendala dalam pengembangan koperasi di daerah, yaitu:

- * Legalitas usaha koperasi, yang ditunjukkan dengan rendahnya persentase koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) (8,53%) dibandingkan standar nasional (35,19%).
- * Aktivitas usaha koperasi tidak bergerak signifikan, dan
- * Koperasi belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam berusaha.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- * Temu mitra koperasi: kerjasama koperasi dengan Bulog dalam penyaluran beras;
- * Advokasi digitalisasi koperasi, dan
- * Fasilitasi pembiayaan melalui LPDB-KUMKM Dana Bergulir, PIP, dan KUR.

Sumatera Selatan telah menandatangani Program Sinergi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM Melalui Pembiayaan Ultra Mikro (Pusat Investasi Pemerintah) melalui Nota Kesepakatan Tentang Sinergi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan Melalui Pembiayaan Ultra Mikro, Nomor: NK-1/IP/2024 dan Nomor: 019/NK/OTDA/I/2024. Adapun usulan kredit yang diajukan sebagaimana Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12 Usulan Kredit Program PIP

No.	Nama Koperasi	Alamat	Kab/Kota	Kredit yang Diajukan
1	Kopdit Karya Jasa	Jl. Jend Sudirman, Ruko Sudirman Center No. 9d Telp 0711 - 311687	Palembang	Rp3.500.000.000
2	Kop Konsumen BMT Trans Mekar Sari Mandiri	Jl Tanjung Api-Api KM 42 Desa Mulyasari Kec. Tanjunglago	Banyuasin	Rp1.000.000.000
3	Kop Konsumen Sarana Makmur Bersama-Sama	Jl. Palembang Rambutan KM. 19 Desa Sako Kec. Rambutan	Banyuasin	Rp400.000.000
4	KSP Lestari	Jl. Perlda Husni	Lubuklinggau	Rp1.000.000.000

Sumber: Bidang Pemberdayaan Koperasi

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dalam penggunaan sumber daya tidak dapat dipisahkan dari konsep efektivitas. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu keluaran dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, efisiensi anggaran merupakan salah satu tujuan utama dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, yang mencerminkan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan harapan atau belum.

Dalam konteks manajemen sumber daya, ekonomi berfokus pada aspek input, efisiensi menitikberatkan pada proses dan output, sedangkan efektivitas berorientasi pada outcome atau hasil yang dicapai. Sebuah organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang ditetapkan, atau dengan kata lain, dapat dikategorikan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya yang bijaksana (*spending wisely*).

Analisis Efektivitas Penyerapan anggaran:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

- P : Penyerapan Anggaran
- RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja

Analisis Efisiensi Efisiensi anggaran:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke-i} / RVK_{ke-i}}{PAK_{ke-i} / TVK_{ke-i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

- PAK : Pagu anggaran
- RAK : Realisasi anggaran
- TVK : Target keluaran
- RAK : Realisasi keluaran
- E : Efisiensi
- n : jumlah keluaran

Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Tiap Program

No	Sasaran Strategis	Program	Outcome	Keluaran		Anggaran		Efisiensi
				Target (TVK)	Realisasi (RVK)	PAK	RAK	
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	5	7,42	50.000.000	49.917.564	32,73%
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	5	7,42	20.000.000	19.978.570	32,69%
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan Modal Koperasi (%)	12,23	10,99	1.342.500.000	1.232.173.419	-2,14%
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi aktif (%)	66,2	60,53	175.000.000	170.553.928	-6,59%
2.	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	Program Pemberdayaan UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (%)	3	2,96	2.653.783.351	2.390.837.972	8,69%
		Program Pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	3,09	628.608.649	486.065.837	21,42%
Efisiensi Anggaran								14,47%
Efektivitas Penyerapan Anggaran								93,62%

Efisiensi pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan diukur pada tingkat capaian Sasaran Strategis, yang mana di tahun 2024 sudah menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien, sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian pernyataan kinerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan UMKM serta penguatan koperasi telah dijalankan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan usaha kecil, akses permodalan, kemitraan, serta kualitas kelembagaan koperasi. Meskipun beberapa indikator menunjukkan pencapaian yang positif, terdapat pula tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam hal pertumbuhan wirausaha, peningkatan koperasi aktif, dan penguatan modal koperasi. Analisis ini akan menguraikan sejauh mana keberhasilan atau kendala dari setiap program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

(1). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan UMKM di daerah. Berdasarkan data kinerja tahun 2024, program ini menunjukkan hasil yang beragam. Indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha mencapai 2,96%, sedikit di bawah target sebesar 3%. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan telah berjalan dengan baik. Namun, rasio kredit UMKM terhadap total kredit mencapai 30,75%, melampaui target sebesar 24,69%, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar mencapai 70%, melampaui target 65%, yang menunjukkan bahwa program kemitraan telah berhasil meningkatkan kolaborasi antara UMKM dan industri besar. Secara keseluruhan, program

ini berhasil dalam meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan, meskipun perlu peningkatan dalam mendorong lebih banyak usaha kecil menjadi wirausaha.

(2). Program Pengembangan UMKM

Program ini fokus pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Indikator rasio kewirausahaan mencapai 3,09%, sedikit di bawah target sebesar 3,14%. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha tetap tinggi. Namun, persentase pertumbuhan wirausaha hanya mencapai 1,39%, jauh di bawah target 3%, yang mengindikasikan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan wirausaha baru. Di sisi lain, jumlah promosi dan pemasaran produk UKM berhasil mencapai target 1 kali, dan jumlah UMKM on-boarding digital mencapai 80.754, meskipun masih di bawah target 105.787. Program ini menunjukkan keberhasilan dalam hal promosi dan digitalisasi UMKM, namun perlu peningkatan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha baru.

(3). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi melalui pengawasan dan pemeriksaan. Indikator meningkatnya koperasi yang berkualitas mencapai 7,42%, jauh melampaui target sebesar 5%. Capaian ini menunjukkan bahwa program pengawasan dan pemeriksaan koperasi berjalan sangat efektif. Selain itu, koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya mencapai 20%, sesuai dengan target. Program ini berhasil dalam meningkatkan kualitas koperasi melalui pengawasan yang ketat dan pemeriksaan yang terstruktur.

(4). Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini bertujuan untuk menilai kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Indikator meningkatnya koperasi yang berkualitas juga mencapai 7,42%, melampaui target 5%. Selain itu, koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan mencapai 10%, sesuai dengan target. Program ini berhasil dalam meningkatkan kualitas koperasi melalui penilaian kesehatan yang komprehensif, yang membantu koperasi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan kelembagaan.

(5). Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Indikator pertumbuhan modal koperasi mencapai 10,99%, di bawah target sebesar 12,23%. Meskipun belum mencapai target, SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya mencapai 2%, sesuai dengan target. Program ini berhasil dalam meningkatkan kompetensi SDM koperasi, namun perlu peningkatan dalam mendorong pertumbuhan modal koperasi.

(6). Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perlindungan koperasi. Indikator koperasi aktif mencapai 60,53%, di bawah target sebesar 66,2%. Namun, pertumbuhan omzet koperasi mencapai 60,73%, jauh melampaui target 16%. Selain itu, koperasi yang melakukan RAT mencapai 17,39%, melampaui target 10,1%. Program ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan omzet koperasi dan partisipasi anggota dalam RAT, meskipun perlu peningkatan dalam meningkatkan jumlah koperasi aktif.

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (%)	3	2,96	2.653.783.351	2.390.837.972
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit (%)	24,69	30,75	2.653.783.351	2.390.837.972
			Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/ besar (%)	65	70		
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	3,09	628.608.649	486.065.837
		Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha (%)	3	1,39	628.608.649	486.065.837
			Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM (kali)	1	1		
Jumlah UMKM on-boarding digital (UMKM)	105787		80754				
2	Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	5	7,42	50.000.000	49.917.564
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya (%)	20	20	50.000.000	49.917.564
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	5		
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan (%)	10	10	20.000.000	19.978.570
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Modal Koperasi (%)	12,23		
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	SDM koperasi yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya (%)	2	2	1.342.500.000	1.232.173.419

No.	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi aktif (%)	66,2	60,53	175.000.000	170.553.928
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	pertumbuhan omzet koperasi (%)	16	60,73	175.000.000	170.553.928
			koperasi yang melaksanakan RAT (%)	10,1	17,39		
			koperasi yang mengadopsi teknologi informasi (%)	0,98	0,98		
			Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL (%)	0,35	0,35		

Secara umum, dilihat dari Tabel 3.14, program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa program seperti Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi serta Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi berhasil melampaui target, sementara program lainnya seperti Pengembangan UMKM dan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian masih perlu peningkatan. Evaluasi dan perbaikan terhadap program yang belum mencapai target diperlukan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 93,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp15.206.848.747,00, dengan realisasi sebesar Rp14.236.030.680,90. Sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp970.818.066,10. Pada belanja operasi, realisasi mencapai 93,48% dengan sisa anggaran sebesar Rp970.327.606,00. Belanja pegawai mencatat realisasi sebesar 94,48%, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 92,35%. Untuk belanja modal, realisasi mencapai 99,85%, dengan belanja modal peralatan dan mesin mencapai 99,71% dan belanja modal gedung dan bangunan mencapai 100%. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran APBD seperti terlihat pada Tabel 3.15 menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada belanja modal yang hampir mencapai 100%. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran, terutama pada belanja barang dan jasa.

Tabel 3.15 Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBD

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
TOTAL BELANJA	15.206.848.747,00	14.236.030.680,90	970.818.066,10	93,62
BELANJA OPERASI	14.871.207.747,00	13.900.880.141,00	970.327.606,00	93,48
Belanja Pegawai	7.850.623.000,00	7.417.053.350,00	433.569.650,00	94,48
Belanja Barang Jasa	7.020.584.747,00	6.483.826.791,00	536.757.956,00	92,35
BELANJA MODAL	335.641.000,00	335.150.539,90	490.460,10	99,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.790.000,00	168.300.000,00	490.000,00	99,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.851.000,00	166.850.539,90	460,10	100,00

Realisasi anggaran APBN untuk Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi mencapai 99,46% dari pagu anggaran sebesar Rp3.069.698.000,00, dengan realisasi sebesar Rp3.053.188.148,00. Sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp16.509.852,00. Capaian ini menunjukkan bahwa program-program yang didanai oleh APBN telah berjalan dengan sangat efektif, dengan penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100% seperti tertuang pada Tabel 3.16. Hal ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program-program kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi.

Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBN

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	3,069,698,000,00	3,053,188,148,00	16,509,852,00	99,46

Terdapat perubahan dalam anggaran APBD tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 3.17, di mana total belanja mengalami penurunan sebesar Rp113.206.733,00 dari anggaran induk sebesar Rp15.320.055.480,00 menjadi Rp15.206.848.747,00. Pada belanja operasi, terjadi penurunan sebesar Rp140.847.733,00, dengan belanja pegawai berkurang sebesar Rp353.432.000,00, sementara belanja barang dan jasa meningkat sebesar Rp212.584.267,00. Belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp27.641.000,00, terutama pada belanja modal peralatan dan mesin yang bertambah sebesar Rp28.790.000,00, sedangkan belanja modal gedung dan bangunan berkurang sebesar Rp1.149.000,00. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam alokasi anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.17 Perubahan Anggaran APBD 2024

URAIAN	Induk	Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
TOTAL BELANJA	15.320.055.480	15.206.848.747	(113.206.733)
BELANJA OPERASI	15.012.055.480	14.871.207.747	(140.847.733)
- Belanja Pegawai	8.204.055.000	7.850.623.000	(353.432.000)
- Belanja Barang Jasa	6.808.000.480	7.020.584.747	212.584.267
BELANJA MODAL	308.000.000	335.641.000	27.641.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.000.000	168.790.000	28.790.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.000.000	166.851.000	(1.149.000)
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Secara umum, realisasi anggaran APBD dan APBN tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik, dengan penyerapan anggaran yang tinggi, terutama pada belanja modal dan program-program yang didanai oleh APBN. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran, terutama pada belanja barang dan jasa. Perubahan anggaran yang terjadi juga mencerminkan penyesuaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara rinci, realisasi pelaksanaan anggaran di masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada APBD 2024 dapat diuraikan dalam Tabel 3.18 dan Tabel 3.19 berikut. Hal ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta capaian kinerja yang dihasilkan.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran tiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (100%)	10.336.956.747	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp9.886.503.391 atau 95,64% dengan sisa pagu anggaran Rp450.453.356	100% pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan (100%)	45.800.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp45.740.648 atau 99,87% dengan sisa pagu anggaran Rp59.352	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja terselenggara 100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia (2 Dok)	45.800.000	Realisasi Keuangan Sub Kegiatan Sebesar Rp45.740.648 atau 99,87% dengan sisa pagu anggaran Rp59.352 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	2 Dokumen Perencanaan tersedia
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%)	8.463.915.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp8.024.708.550 atau 94,81% dengan sisa pagu anggaran Rp439.206.450	100 administrasi keuangan perangkat daerah terpenuhinya
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji & tunjangan ASN yang dibayarkan (14 Bulan)	7.820.263.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp7.386.693.350 atau 94,46% dengan sisa pagu anggaran Rp433.569.650 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	14 bulan gaji dan tunjangan ASN dibayar
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium TKS (33 orang x 12 Bulan)	608.292.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp602.657.000 atau 99,07% dengan sisa pagu anggaran Rp5.635.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	12 bulan gaji Non ASN dibayarkan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium penatausahaan keuangan (12 Bulan)	35.360.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp35.358.200 atau 99,99% dengan sisa pagu anggaran Rp1.800 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	12 Bulan Honorarium penatausahaan keuangan dibayar
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya adm keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan (100%)	632.350.747	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp631.909.183 atau 99,93% dengan sisa pagu anggaran Rp441.564	100 adm keuangan perangkat daerah terselenggara
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor (12 Bulan)	20.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp19.999.100 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp900 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	komponen instalasi listrik disediakan selama 12 bulan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor (2 paket)	60.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp59.589.240 atau 99,33% dengan sisa pagu anggaran Rp410.760 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Penyediaan souvenir, roller blind, dan plakat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK dan makan minum rapat tersedia (12 Bulan)	150.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp149.999.500 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp500 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	ATK dan makan minum rapat tersedia selama 12 bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bahan cetakan dan penggandaan (12 Bulan)	20.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp20.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp0 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	bahan cetakan dan penggandaan tersedia 12 Bulan

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (12 bulan)	382.350.747	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp382.321.343 atau 99,99% dengan sisa pagu anggaran Rp29.404 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terpenuhi selama 12 bulan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah (100%)	168.790.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp168.300.000 atau 99,71% dengan sisa pagu anggaran Rp490.000	BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah terpenuhi 100%
	Pengadaan Mebel	Unit mebel yang tersedia (1 paket)	43.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp43.500.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp0 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	1 paket mebel disediakan
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan (8 Unit)	125.290.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp124.800.000 atau 99,61% dengan sisa pagu anggaran Rp490.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	8 unit pelatan mesin disediakan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)	555.800.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp547.159.695 atau 98,45% dengan sisa pagu anggaran Rp8.640.305	jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia 100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 Bulan)	254.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp247.966.169 atau 97,62% dengan sisa pagu anggaran Rp6.033.831 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Internet, air dan listrik tersedia selama 12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan jasa umum kantor (12 Bulan)	301.800.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp299.193.526 atau 99,14% dengan sisa pagu anggaran Rp2.606.474 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Jasa sopir, kebersihan dan keamanan tersedia selama 12 bulan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	470.301.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp468.685.315 atau 99,66% dengan sisa pagu anggaran Rp1.615.685	BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara 100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas terpelihara (12 Bulan)	263.450.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp261.835.665 atau 99,39% dengan sisa pagu anggaran Rp1.614.335 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	kendaraan dinas terpelihara dengan baik selama 12 bulan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin yang terpelihara (12 Bulan)	40.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp39.999.110 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp890 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	peralatan dan mesin kantor terpelihara selama 12 bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang direhab (1 gedung)	166.851.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp166.850.540 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp460 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	1 gedung kantor dipelihara
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (5%)	50.000.000	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp49.917.564 atau 99,84% dengan sisa pagu anggaran Rp82.436	7,42% koperasi berkualitas (sehat dan cukup sehat)
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang diawasi dan diperiksa	50.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp49.917.564 atau 99,84% dengan sisa pagu anggaran Rp82.436	20% koperasi diawasi dan diperiksa

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
		kelembagaan dan usahanya (20%)			
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah orang yang memahami pengawasan dan pengendalian koperasi (20 kop)	50.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp49.917.564 atau 99,84% dengan sisa pagu anggaran Rp82.436 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya jumlah orang yang memahami pengawasan dan pengendalian koperasi sejumlah 100 orang
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (5%)	20.000.000	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp19.978.570 atau 99,89% dengan sisa pagu anggaran Rp21.430	7,42% koperasi berkualitas (sehat dan cukup sehat)
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan (10%)	20.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp19.978.570 atau 99,89% dengan sisa pagu anggaran Rp21.430	10% koperasi diperiksa kesehatannya
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktivitas Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (20 kop)	20.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp19.978.570 atau 99,89% dengan sisa pagu anggaran Rp21.430 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	20 koperasi dinilai kesehatannya
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Modal Koperasi (12,23%)	1.342.500.000	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp1.232.173.419 atau 91,78% dengan sisa pagu anggaran Rp110.326.581	10,99% modal sendiri tumbuh
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian an bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (2%)	1.342.500.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp1.232.173.419 atau 91,78% dengan sisa pagu anggaran Rp110.326.581	2% SDM koperasi mendapat pelatihan teknis dan manajerial
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan (438 orang)	1.342.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp1.232.173.419 atau 91,78% dengan sisa pagu anggaran Rp110.326.581 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	438 orang mendapatkan sertifikat pelatihan perkoperasian
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi aktif (66,20%)	175.000.000	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp170.553.928 atau 97,46% dengan sisa pagu anggaran Rp4.446.072	60,53% koperasi aktif
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	pertumbuhan omzet koperasi (16%) koperasi yang melaksanakan RAT (10,10%) koperasi yang mengadopsi teknologi informasi (0,98%) Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL (0,35%)	175.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp170.553.928 atau 97,46% dengan sisa pagu anggaran Rp4.446.072	60,73% omzet koperasi tumbuh koperasi RAT 17,39% dari total koperasi
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi yg difasilitasi penguatan kelembagaan (30 kop)	90.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp88.961.094 atau 98,85% dengan sisa pagu anggaran Rp1.038.906 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya target sebanyak 200 orang (80 orang bidang koperasi dan 120 orang bidang kelembagaan)

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang diberdayakan (20 kop)	85.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp81.592.834 atau 95,99% dengan sisa pagu anggaran Rp3.407.166 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya target sebanyak 200 orang (80 orang bidang koperasi dan 120 orang bidang kelembagaan)
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (3%)	2.653.783.351	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp2.390.837.972 atau 90,09% dengan sisa pagu anggaran Rp262.945.379	usaha kecil yang menjadi wirausaha (2,96%)
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit (24,69%) Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/ besar (65%)	2.653.783.351	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp2.390.837.972 atau 90,09% dengan sisa pagu anggaran Rp262.945.379	Rasio kredit UMKM 30,75%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (656 orang)	2.653.783.351	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp2.390.837.972 atau 90,09% dengan sisa pagu anggaran Rp262.945.379 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya jumlah orang miskin yang di bina menjadi wirausaha baru sebanyak 200 orang
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Kewirausahaan (3,14%)	628.608.649	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp486.065.837 atau 77,32% dengan sisa pagu anggaran Rp142.542.812	Rasio kewirausahaan sumsel 3,09%
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha (3,0%) Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM (1 kali) Jumlah UMKM on-boarding digital (105.787 UMKM)	628.608.649	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp486.065.837 atau 77,32% dengan sisa pagu anggaran Rp142.542.812	1 kali promosi dan pemasaran produk UKM
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah fasilitasi promosi (1 kali)	395.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp394.913.837 atau 99,98% dengan sisa pagu anggaran Rp86.163 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Sumsel Expo di Lampung
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (150 orang)	233.608.649	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp91.152.000 atau 39,02% dengan sisa pagu anggaran Rp142.456.649 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	150 UMKM mengikuti sosialisasi literasi hukum
TOTAL ANGGARAN			15.206.848.747	Realisasi Keuangan Sebesar Rp14.236.030.680,90 atau 93,62% dengan sisa pagu anggaran Rp970.818.066	

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran tiap Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024 Satker Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	3.069.698.000	3.053.188.148	99,46	16.509.852
EB Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	3.069.698.000	3.053.188.148	99,46	16.509.852
EB.2726 Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	3.069.698.000	3.053.188.148	99,46	16.509.852
AEH Promosi	141.040.000	140.918.800	99,91	121.200
AEH.001 Promosi Produk UMKM Provinsi	141.040.000	140.918.800	99,91	121.200
051 <i>Fasilitasi Smesco Galery</i>	<i>141.040.000</i>	<i>140.918.800</i>	<i>99,91</i>	<i>121.200</i>
BDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	2.394.300.000	2.392.050.000	99,91	2.250.000
BDF.001 Satuan Tugas Pengawas Koperasi	2.394.300.000	2.392.050.000	99,91	2.250.000
051 <i>Honorarium Satuan Tugas Pengawas Koperasi</i>	<i>13.500.000</i>	<i>11.250.000</i>		<i>2.250.000</i>
052 <i>Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)</i>	<i>2.380.800.000</i>	<i>2.380.800.000</i>	<i>100</i>	-
FAD Perencanaan dan Penganggaran	448.618.000	434.479.348	96,85	14.138.652
FAD.001 Perencanaan program Kementerian Koperasi dan UKM di Daerah	448.618.000	434.479.348	96,85	14.138.652
051 <i>Honorarium Pengelola Anggaran</i>	<i>82.944.000</i>	<i>82.940.555</i>	<i>100</i>	<i>3.445</i>
053 <i>Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan)</i>	<i>21.940.000</i>	<i>21.837.000</i>	<i>99,53</i>	<i>103.000</i>
054 <i>Rapat Penyusunan Anggaran Dekonsentrasi</i>	<i>12.331.000</i>	<i>11.135.000</i>	<i>90,30</i>	<i>1.196.000</i>
055 <i>Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah (Rakorda)</i>	<i>230.585.000</i>	<i>224.183.000</i>	<i>97,22</i>	<i>6.402.000</i>
056 <i>Rapat Pengelola Anggaran (SAI)</i>	<i>20.184.000</i>	<i>17.646.600</i>	<i>87,43</i>	<i>2.537.400</i>
057 <i>Honorarium ODS</i>	<i>30.250.000</i>	<i>30.250.000</i>	<i>100</i>	-
058 <i>Bimbingan Teknis Perencanaan</i>	<i>50.384.000</i>	<i>46.487.193</i>	<i>92,27</i>	<i>3.896.807</i>
FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	85.740.000	85.740.000	100	-
FBA.001 Daerah-daerah yang difasilitasi Operasional PLUTnya	85.740.000	85.740.000	100	-
051 <i>Fasilitasi PLUT di Daerah</i>	<i>85.740.000</i>	<i>85.740.000</i>	<i>100</i>	-

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari persentase tingkat pencapaian indikator sasaran dan realisasi anggaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2 Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam upaya pemenuhan capaian target sasaran di akhir RPD, diperlukan langkah-langkah sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Sebagian pengurus koperasi masih belum memahami pengelolaan manajerial koperasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.	Memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial agar kompetensi pengurus dalam mengelola koperasi lebih meningkat.
2.	Masih ada koperasi yang belum patuh terhadap peraturan perkoperasian baik aspek prinsip koperasi, aspek kelembagaan, aspek legalitas formal sebagai landasan dalam pengelolaan koperasi maupun aspek usaha serta transaksi.	Memberikan pemahaman terhadap pengurus koperasi akan kewajibannya sebagai pengurus dan melakukan monitoring terhadap koperasi aktif yang belum melaksanakan Rapat Tahunan Anggota.
3.	Masih banyak koperasi aktif akan tetapi tidak melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) sebagai satu kewajiban pengurus koperasi.	Memberikan pemahaman prinsip-prinsip koperasi terhadap anggota koperasi bahwa koperasi dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotongroyong untuk bersama-sama memberikan manfaat baik secara lembaga maupun individu.
4.	Permodalan yang dimiliki koperasi yang terbatas ditambah kesadaran anggota koperasi masih rendah akan kewajiban sebagai anggota koperasi sehingga berpengaruh pada pengembangan usaha koperasi.	Peningkatan usaha koperasi dengan melakukan pendampingan dengan stockholder seperti Diskop, UKM Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut
5.	Terbatasnya pemasaran dan distribusi produk-produk UMKM dan koperasi.	Peningkatan kemitraan koperasi dengan lembaga perbankan dalam peningkatan modal usaha koperasi serta membuka jalur informasi, distribusi dan pemasaran dengan pengusaha local seperti Grab, dan Bank sebagai mitra telah memberikan kesempatan untuk menggelar produk produk UMKM dan koperasi di Sumatera Selatan.
6.	Masih kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi kesehatan (PIRT) dan HALAL dalam pencapaian kualitas produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran.	Memfasilitasi pelaku usaha dengan sosialisasi serta bimbingan teknis terhadap pelaku usaha akan pentingnya Sertifikasi Kesehatan (PIRT) dan HALAL.
7.	Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan rendahnya motivasi dalam kewirausahaan sehingga pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan usaha terutama dalam memasarkan produknya ditambah dengan banyaknya produk produk luar yang masuk dengan kualitas produk sama dengan harga yang lebih murah.	Memberikan bimbingan, pelatihan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dari mulai kualitas, kuantitas bahkan sampai ke pemasaran produk; Memfasilitasi pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya melalui event-event pameran ataupun dengan ataupun dengan pemasaran Online dengan memanfaatkan sosialmedia bahkan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan lainnya seperti misalnya pusat oleh-oleh maupun melalui mini market-mini market yang sudah banyak tersebar di setiap daerah; Menyediakan tempat berupa outlet-outlet yang strategis untuk menampung dan memasarkan produk-produk UMKM.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang serta dapat memberikan gambaran Kinerja organisasi kepada pihak-pihak terkait ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif untuk membangun Sumatera Selatan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 ½ No. 565 Telp. 352082 Fax. (0711) 357069

PALEMBANG - 30129

Palembang, 17 Februari 2025

Nomor : 100.2.7/20/DKUKM-I/II/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2024

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

di -

P a l e m b a n g

Bersama dengan ini kami menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (*terlampir*)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Tanda Terima

AAM 18/2025
2

Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196605091992031003